

**PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN
IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu



Oleh :

IRA HALIDAYATI

2009/98674

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi
Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh)**

Oleh :

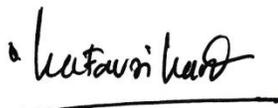
Ira Halidayati

98674 / 2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Juni 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... April 2014

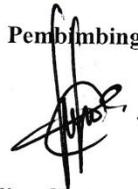
Pembimbing I



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Nip. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak

Nip. 19801019 200604 2 002

PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)

Ira Halidayati

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : irahalidayati@ymail.com

ABSCTRACT

This study aimed to determine : (1) Effect of internal control of the local government performance . (2) The effect of external monitoring of the performance of local government . (3) The effect of the implementation of performance-based budgeting on the performance of local governments . Population in this study were working units (SKPD) in Payakumbuh . The technique of sampling is the total sampling method . Data collection method is to survey used a questionnaire . Analysis used multiple regression analysis using SPSS version 16 . The results showed that : (1) internal control has positive significant effect on the performance of local governments. (2) external supervision doesn't has significant positive effect on the performance of local government, which means that H2 is rejected. (3) Performance-based budgeting positive significant effect on the performance of local government.

Keywords: Internal Control, External Monitoring, Perfomance-Based Budgeting, Government Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) Pengaruh pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Payakumbuh. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.(2) Pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang desentralistik partipatoris (Mardiasmo, 2006). Otonomi yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah.

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai.

Menurut Indra (2006) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, *outcome* hasil kerja organisasi. Mardiasmo (2002) menyatakan Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Mardiasmo (2002) aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Dalam organisasi sektor publik, pengawasan keuangan negara bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Pengklasifikasian pengawasan menurut lingkupnya dapat dikelompokkan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang bersal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Baswir, 1999). Bila dirinci lebih lanjut, pengawasan internal ini pun dapat dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.

Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari

lingkungan internal departemen atau lembaga Negara yang diawasi. Sedangkan pengawasan internal dalam arti luas adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah dan lembaga eksekutif (Baswir, 1999).

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif (Baswir, 1999). Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal ini antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator kinerja. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan.

Anggaran berbasis kinerja dapat menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan hasil/keluaran yang akan dicapai sehingga memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan. Pada akhirnya anggaran berbasis kinerja ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, karena menyediakan sarana bagi para

pengambil keputusan dan lembaga terkait dalam menetapkan prioritas dan memilih program berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta biaya yang terkait dengan pelaksanaan program.

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, DPRD Kota Payakumbuh memberikan rekomendasi terkait konsep strategis serta perbaikan kinerja masing-masing SKPD. Apresiasi dan kritikan kinerja itu diajukan wakil rakyat sebagai aktualisasi dari fungsi pengawasan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2012. Berdasarkan rekap laporan masing-masing komisi yang diterima beberapa rekomendasi untuk SKPD terlihat lebih banyak ditujukan untuk memperbaiki kinerja termasuk permasalahan yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Diantaranya pada kebutuhan anggaran suatu program dari kegiatan masing-masing SKPD belum diperhitungkan secara matang, beberapa kegiatan yang masih terbengkalai akibat kurang matangnya perencanaan suatu kegiatan, kurangnya pengawasan serta pengendalian dana yang disalurkan ke masyarakat dan terdapatnya SKPD yang membelanjakan anggaran belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya kinerja SKPD Kota Payakumbuh belum tercapai secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan lagi. (Posmetro Padang, 20 Juni 2013).

Hasil penelitian Wawan (2009) tentang pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada variabel bebasnya yaitu penulis menambahkan pengawasan ektern dan anggaran berbasis kinerja, sedangkan

variabel terikatnya sama yaitu kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh penerapan pengawasan internal, pengawasan eksternal dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris dengan judul: “ **Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah**”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejuahmana pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Sejuahmana pengaruh pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Sejuahmana pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah
 2. Pengaruh pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah
 3. Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah
- Manfaat penelitian:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini akan dapat menjadi masukan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah khususnya hubungan pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi akademis, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kinerja Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Jadi, kinerja dapat dipahami sebagai suatu pencapaian hasil dan/atau sebagai suatu penilaian terhadap proses kegiatan/program. Kinerja dari suatu pemerintah daerah merupakan cerminan kualitas proses atau keberhasilan kegiatan/program yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk hasil berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara obyektif, maka diperlukan indikator. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada biaya dan kualitas pelayanan. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Indikator yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik berikut:

1. Sederhana dan mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikualifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja
5. Berfokus pada customer service, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji secara teratur

Berikut beberapa manfaat indikator kinerja yang dinyatakan oleh Dedi (2007):

1. Kejelasan tujuan organisasi 2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas 3. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas 4. Tersedianya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda 5. Tersedianya fasilitas *setting of target* untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik saham.

c. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam membahas kinerja suatu organisasi, tidak terlepas dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kinerja yang tinggi maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas yang dapat dilaksanakan oleh organisasi, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah. Sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manager sektor publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* dan *non financial* (Mardiasmo, 2006).

Menurut Mardiasmo (2002), *value for money* (ekonomis, efisien dan efektifitas) merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Untuk lebih jelasnya, Dedi (2008) mengemukakan ekonomi, efisiensi dan efektifitas sebagai berikut:

1. *Economy (Spending Less)*

Ekonomi umumnya mengacu pada kegiatan yang bersumber dari kegiatan pengadaan sumber daya dalam jumlah dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dengan biaya serendah mungkin.

2. *Efficiency (Spending Well)*

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit kerja staf, upah, biaya administrasi dengan pelayanan.

3. *Effectiveness (Spending Wisely)*

Efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dengan *output*. Dapat juga dikatakan bahwa pengertian efektivitas mengarah kepada hubungan antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas dapat diartikan pula sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Mahmudi (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah:

1. Faktor personal/individual, meliputi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, komitmen.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan pelayanan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manager dan *team leader*.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang akan diberikan oleh rekan dalam suatu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratn anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas/infrastruktur yang diberikan organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (*situasional*) meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

2. Pengawasan

a. Konsep pengawasan

Menurut Basri (2003) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

b. Tujuan pengawasan

Pengawas dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan

tertentu, menurut Wardoyo (1986) dalam Hendra (2011), tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
4. Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

c. Sifat pengawasan

Sifat-sifat pengawasan dikemukakan Siagian dalam Kamar (2004) dalam Salman (2001) meliputi:

1. Mencari fakta tentang tugas yang dilaksanakan dan aspek psikologis seperti rasa hormat, dihargai dan kemajuan dalam karir.
2. Preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan.
3. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.
4. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi.
5. Mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikerjakan.
6. Tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Bahkan mencari atau menentukan siapa yang salah tetapi menemukan apa yang tidak benar.
8. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugasnya.

d. Prinsip Pengawasan

Menurut Kamar (2004) dalam Salman (2001) mengatakan prinsip pengawasan antara lain:

1. Pengawasan hendaknya dimulai sejak rencana disusun yang menyangkut

efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan penggunaan sumber daya.

2. Temuan pengawasan harus ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.
3. Pengawasan hendaklah orang yang mempunyai kemampuan teknis, kesungguhan kerja dan kepribadian terpuji.
4. Pengawasan hendaklah dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun, tidak boros, tepat waktu dan mengenai objek yang tepat.

3. Pengawasan Internal

a. Pengertian

Menurut Revrison (1998) pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Pengawasan internal inipun dibagi menjadi pengawasan internal dalam arti sempit dan pengawasan internal dalam arti luas.

Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. Dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia, fungsi pengawasan internal dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Pembangunan (Irjenbang).

b. Manfaat Pengawasan Internal (Inspektorat)

Pengawasan internal dapat membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dan juga dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan terhindar dari hal yang merugikan.

c. **Komponen Pengawasan Internal**

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengawasan (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information And Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

d. **Indikator Keberhasilan Pengawasan**

Revrisond (1999) mengemukakan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diantaranya adalah:

- 1) Meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
 - b. Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sebagai misal, gaji pegawai negeri diterima oleh yang bersangkutan secara tepat waktu dan jumlah.
- 3) Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar.
- 4) Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

4. **Pengawasan Eksternal**

a. **Pengertian**

Menurut Baswir (1998) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

b. **Indikator Pengawasan Eksternal**

Dalam undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi pengawasan eksternal pemerintah yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/daerah, yang meliputi unsur keuangan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

1. Pelayanan
2. Pemeriksaan BPK
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan DPRD

5. **Anggaran Berbasis Kinerja**

a. **Pengertian Anggaran**

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.

b. **Pengertian anggaran berbasis kinerja**

Secara teori, anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran Negara (pengeluaran Negara) dengan hasil yang diinginkan (*ouput* dan *outcome*) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. *Performance budgeting* (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah system penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Indra, 2006). *Perfomance budgeting* mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi. Anggaran berbasis kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaian tujuan, program dan didasari oleh pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat

keberhasilan program, baik disisi eksekutif maupun legislative. Oleh sebab itu anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

c. Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja

Dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terdapat elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu: Visi dan Misi yang hendak dicapai, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

d. Kelebihan dan Kelemahan Anggaran Berbasis Kinerja

Dedi (2006) menyatakan beberapa kelebihan dari anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Penekanannya pada semua aktivitas di setiap anggaran secara naratif.
2. Anggaran disusun berdasarkan aktivitas dengan permintaan yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
3. Anggaran kinerja mensyaratkan adanya data-data kinerja yang memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
4. Menyediakan kepala eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
5. Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memakai anggaran daripada jumlah anggaran yang terpakai.

Berikut beberapa kelemahan anggaran berbasis kinerja menurut Dedi (2006) yaitu:

1. Hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran dan akuntansi yang memadai dalam mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya.
2. Banyak jasa atau aktivitas pemerintah tidak dapat langsung berukur dalam satuan unit output atau biaya perunit yang dapat dimengerti dengan mudah.
3. Akun-akun dalam pemerintahan telah secara khusus dibuat dasar anggaran yang dikeluarkan.

4. Kadang kala biaya atas aktivitas, diukur secara langsung tanpa mempertimbangkan perlu atau tidaknya aktivitas tersebut.

e. Langkah-Langkah Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Agar penerapan anggaran berbasis kinerja berlangsung dengan baik guna meningkatkan kinerja, maka diperlukan langkah-langkah pokok sebagai berikut (iman,2008):

1. Penyusunan Rencana Strategik
2. Sinkronisasi
3. Penyusunan Kerangka Acuan
4. Perumusan/penetapan Indikator Kinerja
5. Pengukuran kinerja/Akuntabilitas kinerja
6. Pelaporan kinerja

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wawan (2009) meneliti tentang pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada SKPD kota Tasikmalaya. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 11 dinas yang berada di Tasikmalaya dengan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda dan pelaksanaan system akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada variabel bebasnya yaitu penulis menambahkan pengawasan ektern dan

anggaran berbasis kinerja, sedangkan variabel terikatnya sama yaitu kinerja pemerintah daerah.

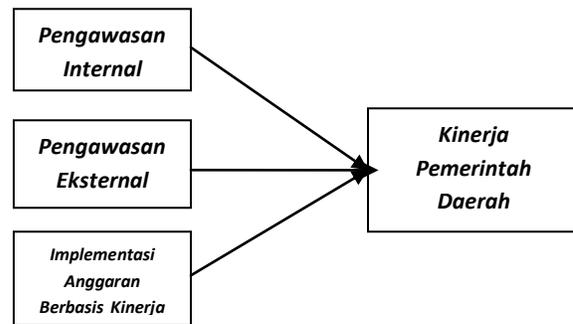
Penelitian Sem (2012) yang meneliti tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, system akuntansi keuangan daerah dan system informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan kota Dumai. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 33 SKPD yang berada di Kota Dumai. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh anggaran berbasis kinerja dan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja SKPD.

Penelitian Agustinus (2012) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan internal, pengawas eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan Kota Bandung. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 84 SKPD. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pengawasan internal dan pengawasan eksternal berpengaruh cukup kuat secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Kinerja Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen, pengawasan internal, pengawasan eksternal dan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel independen.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Payakumbuh.

2. Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel total sampling dan seluruh SKPD yang terdapat di Kota Payakumbuh dijadikan sebagai sampel. Unit analisis dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah SKPD yang ada di Kota Payakumbuh adalah sebanyak 31 SKPD.

3. Responden

Responden penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan karena bagian tersebut terlibat langsung dan bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, sehingga responden berjumlah 62 orang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data subjek. **Sumber Data** penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner diantarkan langsung ke alamat responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh pimpinan SKPD Payakumbuh.

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Pengawasan Internal (X1), Pengawasan Eksternal (X2) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X3).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang

telah lulus mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Publik Lanjutan, Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Akuntansi 2.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam, 2006). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $>0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variances Inflating Factor*) kecil dari 10 dan tolerance besar dari 0,10.

3) Uji Heterokedastisitas

Dalam uji ini, apabila hasilnya sig besar dari pada 0,05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

J. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

2. Model Analisis

Model analisis yang dipakai adalah metode regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = kinerja pemerintah daerah

a = konstanta

$b_{1,2}$ = koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pengawasan internal
 X_2 = pengawasan eksternal
 X_3 = anggaran berbasis kinerja = epsilon (variabel-variabel independen lain yang tidak diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel lain).

Uji Model

a. Uji F (F-test)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{\frac{(1-R^2)}{(n-k)}}$$

Keterangan :

F = uji F

R^2 = Koefisien determinan

K = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

b. Uji koefisien determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari Adjusted R Square-nya, koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikatnya. Adjusted R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan banyaknya variabel X yang ada pada model.

c. Uji Hipotesis (T-test)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik, dengan rumus:

$$T = \frac{\beta n}{s\beta n}$$

Keterangan :

T = nilai mutlak pengujian

βn = koefisien regresi masing-masing variabel

$s\beta n$ = standar error masing-masing variabel

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau tingkat signifikan $< \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau tingkat signifikan $> \alpha = 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak.

Definisi Operasional

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan tujuan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Payakumbuh.

2. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah yang dilaksanakan oleh badan inspektorat.

3. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh suatu pengawas yang berasal dari luar lingkungan organisasi. Jadi dalam pengawasan eksternal ini, tidak terdapat hubungan kedinasan antara pengawas dengan yang diawasi. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

4. Anggaran berbasis kinerja

Anggaran berbasis kinerja yaitu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan dan dikaitkan dengan visi/misi pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil kerja atau output tersebut dituangkan dalam target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh sebagai unit kerja pemerintah daerah setiap tahunnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Payakumbuh. Setiap sampel memiliki dua responden jadi jumlah sampel dari penelitian ini adalah 62 responden. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 62 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah adalah 62 kuesioner.

A. Demografi Responden

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menjawab kuesioner lebih banyak perempuan yaitu sebanyak 35 responden (56,55%) dan laki-laki sebanyak 27 responden (43,55%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden telah menempuh jenjang pendidikan Strata 1 dengan persentase 53,22% atau sebanyak 33 orang, sedangkan responden yang telah menempuh jenjang pendidikan diploma 3 sebesar 19,36% atau sebanyak 12 orang. Diikuti responden lulusan strata 2 sebesar 17,74% atau sebanyak 11 orang dan responden lulusan SMA dengan persentase terkecil yaitu sebesar 9,68% atau sebanyak 6 orang.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Kompetensi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 9 terlihat bahwa bidang kompetensi yang ditempuh responden dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu Akuntansi (20,97%) manajemen (14,52%) Ekonomi

Pembangunan (11,29 %) dan kompetensi lainnya (53,22 %). Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kompetensi pendidikan formal yang ditempuh Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan SKPD di Kota Payakumbuh yang menjadi responden terdiri dari berbagai jenis bidang kompetensi pendidikan.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian.

Berdasarkan Tabel 10 di atas, terlihat bahwa pada umumnya Kepala Dinas dan Kepala Subbagian Penatausahaan Keuangan SKPD di Kota Payakumbuh yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 29 orang (46,77%), selanjutnya 5-10 tahun yaitu sebanyak 16 orang (25,81%), sedangkan untuk masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 17 orang (27,42%).

B. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Berikut ini merupakan tabel nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing instrumen:

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen pengawasan internal 0,898, instrumen pengawasan eksternal 0,775, instrumen implementasi anggaran berbasis kinerja 0,873 dan untuk instrumen kinerja pemerintah daerah 0,865. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran diatas 0,8 sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 62$, adalah 0,2108. Berikut ini merupakan nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil dari masing-masing instrumen:

Dari Tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Instrumen pengawasan internal diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,387, instrumen pengawasan eksternal nilai terkecil 0,334, instrumen implementasi anggaran berbasis kinerja nilai terkecil 0,248 dan untuk kinerja pemerintah daerah dengan nilai terkecil sebesar 0,225.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test*, jika nilai *asym.sig (2-tailed) > 0.05* maka distribusi data dikatakan normal.

Dari hasil pengolahan SPSS versi 16.0 didapat bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov > 0,05*, yaitu 0,918. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel antar variabel

bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF) < 10* dan *tolerance > 0.1* maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 19 diatas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Gletser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel-variabel $> 0,05$ ($\text{sig} > 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada penelitian ini.

D. Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa kuat model yang dihasilkan dari variabel penelitian ini.

Dari tabel dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* menunjukkan 0,545. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi

anggaran berbasis kinerja terhadap variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 54,5%, sedangkan 45,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi berganda

Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 8,086 + 0,684(X_1) + 0,305(X_2) + 0,398(X_3)$$

Dimana:

X1 = Pengawasan Internal

X2 = Pengawasan Eksternal

X3 = Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 8.086 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal dan implementasi anggaran berbasis kinerja adalah nol maka nilai kualitas kinerja pemerintah daerah adalah sebesar konstansta (8.086).
- Koefisien pengawasan internal sebesar 0,684 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengawasan internal satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,684 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,684.
- Koefisien pengawasan eksternal sebesar 0,305 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pengawasan eksternal satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,305 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,305.
- Koefisien implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,398 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan implementasi anggaran

berbasis kinerja satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,398 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif 0,398.

Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak.

Uji Hipotesis

Uji t (t-test)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 62-3-1 = 58$ adalah 2,0017.

a. Pengawasan Internal (X_1) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 2,0017. Pada variabel pengawasan internal (X_1) nilai t_{hitung} adalah 3,526 dan nilai sig adalah 0,001. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,526 > 2,0017$ atau nilai signifikansi $0,001 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,684. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan pengawasan internal (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. Pengawasan Eksternal (X_2) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 2.001717. Pada variabel pengawasan eksternal (X_2) nilai t_{hitung} adalah 1.153 dan nilai sig adalah 0,254. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,277 < 2,0017$ atau nilai signifikansi $0,254 > \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,305. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan eksternal (X_2) tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi hipotesis kedua dari penelitian ini ditolak.

c. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X_3) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 2.0017. Pada variabel implementasi anggaran berbasis kinerja (X_3) nilai t_{hitung} adalah 2.080 dan nilai sig adalah 0,042. Hal ini dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,080 > 2,0017$ atau nilai signifikansi $0,042 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,398. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jadi hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai $t = 3,526$ dan nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi

pengawasan internal, maka kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD juga akan semakin meningkat.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Wawan dan Lia (2009) mengatakan bahwa “Pengawasan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberikan dampak semakin baik kinerja pemerintah daerah yang dicapai”. Menurut Abdul Rohman (2009) mengatakan bahwa: “Pengawasan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dan membantu para anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi pengawasan intern memonitor apakah perilaku sudah berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik, dan melakukan koreksi atau perilaku dan hasil yang menyimpang dari kinerja yang diinginkan”.

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada data distribusi frekuensi untuk variabel pengawasan internal, dimana tingkat capaian responden untuk variabel pengawasan internal adalah 87,77%, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Dapat disimpulkan pengawasan internal sudah cukup terlaksana dengan baik dalam operasionalnya.

Pengawasan internal yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD. Dalam kenyataan di SKPD kota payakumbuh telah memaksimalkan pengawasan internal dan hal ini telah mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan apabila pengawasan internal baik maka hasil kinerja operasional pemerintah daerah juga akan maksimal dan jika dilihat dari tanggapan responden mengenai variabel pengawasan intern, pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah

pada Pemerintah Kota Payakumbuh sudah optimal.

Pengaruh Pengawasan Eksternal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD di kota Payakumbuh. Berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan eksternal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menyatakan bahwa baik atau buruknya pengawasan eksternal masih belum bisa mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kinerja pemerintah daerah di Kota Payakumbuh.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2013) yang menyatakan bahwa pengawasan ekstern yang dilakukan masyarakat dan dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah atau dengan kata lain pengaruh pengawasan eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menyatakan pengawasan eksternal yang terdiri dari pengawasan BPK, pengawasan dari masyarakat dan pengawasan DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada data distribusi frekuensi untuk variabel pengawasan eksternal, dimana tingkat capaian responden untuk variabel pengawasan eksternal adalah 86,45%, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Jadi dapat disimpulkan pengawasan eksternal sudah cukup terlaksana dengan baik dalam operasionalnya.

Pengawasan eksternal belum dapat mengontrol dan mempengaruhi kinerja

pemerintah sepenuhnya, seperti dinyatakan Sutarya (2013) hanya pengawasan dari BPK yang cukup kuat mengawasi kinerja pemerintah daerah tapi pengawasan dari anggota dewan dan masyarakat orientasi nya masih untuk kepentingan pribadi dan partainya bukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal inilah yang membuat pengawasan eksternal masih kurang kuat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan nilai $t = 2,080$ dan nilai signifikan $0,042 < \alpha = 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa baik atau buruknya penerapan implementasi anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kinerja pemerintah daerah di Kota Payakumbuh.

Hal ini sesuai dengan teori menurut Sem (2012) mengatakan bahwa ” anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah”. Menurut Deifi (2013) mengatakan bahwa mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja adalah anggaran berbasis kinerja yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan perangkat daerah. Hal ini menunjukkan apabila pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, output dan feedback maka akan menghasilkan output/outcome serta kinerja yang baik.

Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanafaatannya. *Performance budgeting* (anggaran yang

berorientasi pada kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Indra, 2006).

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada data distribusi frekuensi untuk variabel implementasi anggaran berbasis kinerja rata-rata nilai capai responden penelitian ini baik yaitu sebesar 87,85%, ini memperlihatkan nilai TCR berada pada kategori baik. Dapat disimpulkan implementasi secara keseluruhan sudah cukup terlaksana dengan baik dalam operasionalnya di pemerintah daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan internal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana semakin besar pengawasan internal maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah (H_1 diterima).
2. Pengawasan eksternal mempunyai pengaruh tidak signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dimana semakin tinggi ataupun rendahnya pengawasan eksternal tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kinerja pemerintah daerah (H_2 ditolak).
3. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah (H_3 diterima).

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan eksternal belum diterapkan maksimal, sehingga rendahnya kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh SKPD. Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan transparan terhadap pengawasan dari eksternal, mengenai kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen mengenai kebijakan anggaran. Selain itu pemerintah juga harus lebih tanggap terhadap temuan auditor. Pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan secara terus menerus agar kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada pengawasan dan implementasi anggaran berbasis kinerja, untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh pemerintah seperti pemahaman tentang sistem pengendalian internal pemerintah, sistem akuntansi pemerintah menuju *accrual basis*, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan faktor lainnya.
3. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada di luar Kota payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rohman, 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Vol. 1, No. 2, 2007. Arikunto Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Sardjito, 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating.

Dedi Nordiwan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* : Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga.
Deifi Sari Maindoka, 2013. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sangehe. Vol.2 No. 1 2013.

I Gusti Agung Rai. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik* Yogyakarta : Salemba Empat.

Indra Bastian. 2005. *Akuntansi Sektor Publik* : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STM YKPM.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Mardiasmo. 2006. *Pengukuran Kinerja Pemda*. Yogyakarta. UAD Press.

Revrison Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE.

Sem Paulus Silalahi, 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah. Vol. 20, No. 3 2012.

Sutaryo, 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. "Keuangan Negara".

Wawan Sukmana. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap

Kinerja Pemerintah Daerah. Vol. 4, No. 1, 2009.

www.google.com/haluan.payakumbuh
kamis 16 Mei 2013

www.google.com/sleman_pos. *Kabid.Was.* Kinerja Bawasda Kabupaten Sleman. 3 Juli 2009.

Yuswar Zainul Basri. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lampiran

Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Pemerintah Daerah	62	51.00	90.00	77.9839	7.96404
Pengawasan Internal	62	38.00	55.00	48.2742	4.87607
Pengawasan Eksternal	62	20.00	40.00	34.5806	3.89008
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	62	49.00	75.00	66.2258	5.62611
Valid N (listwise)	62				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.23795450
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.046
	Negative	-.070
Kolmogorov-Smirnov Z		.555
Asymp. Sig. (2-tailed)		.918
a. Test distribution is Normal.		

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.086	8.368		
	Pengawasan Internal	.684	.194	.529	1.890
	Pengawasan Eksternal	.305	.265	.445	2.247
	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.398	.191	.409	2.445

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	-.690	1.825	.707
	Pengawasan Internal	-.057	.042	.187
	Pengawasan Eksternal	-.012	.058	.832
	implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	.072	.042	.091

a. Dependent Variable: ABSUT

Sumber: Pengolahan data statistik SPSS versi 16

(2014)

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2195.378	3	731.793	25.361	.000 ^a
	Residual	1673.606	58	28.855		
	Total	3868.984	61			

a. Predictors: (Constant), implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal

Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.086	8.368		.966	.338
	Pengawasan Internal	.684	.194	.419	3.526	.001
	Pengawasan Eksternal	.305	.265	.149	1.153	.254
	implementasi anggaran Berbasis Kinerja	.398	.191	.281	2.080	.042

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Adjusted R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 ^a	.567	.545	5.37171

a. Predictors: (Constant), implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal